



Jalan Kabupaten Rusak Berat

221,760 Km

Di-"hotmix" 273,445 Km

TABANAN memiliki jalan kabupaten (per Februari 2015) sepanjang 860,94 kilometer. Sebanyak 298,457 km dalam kondisi baik (34,67 persen), sedangkan kondisi rusak sepanjang 240,910 km (27,98 persen) dan rusak berat 221,760 km (25,76 persen). Perbaikan jalan rusak menjadi prioritas pembangunan di Tabanan. Sejak 2010 (berdasarkan data Dinas PU Tabanan), Pemkab Tabanan telah meng-hotmix jalan sepanjang 273,445 kilometer. Pemkab Tabanan melalui Dinas Pekerjaan Umum sebenarnya telah mengupayakan perbaikan jalan dengan cara hot-

mix, khususnya jalan kabupaten. Banyaknya jalan rusak tentu saja menjadi perhatian serius Pemkab Tabanan. "Sejak 2010 sampai 2015, kami telah berhasil meng-hotmix jalan sepanjang 273,445 kilometer," kata Kadis PU IGN Anom Anthara, Minggu (4/10) kemarin.

Dikatakannya, perbaikan infrastruktur khususnya jalan memang menjadi perhatian utama. Namun karena anggaran terbatas, hotmix jalan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.

Tahun 2010, jalan yang berhasil di-hotmix 95,674 kilometer. Tahun 2011 26,680 kilometer,

tahun 2012 sepanjang 53,878 kilometer. Tahun 2013 kembali turun menjadi 45,605 kilometer. Tahun 2014 panjang jalan kabupaten yang di-hotmix 40,953 kilometer dan tahun 2015 hanya sepanjang 10,655 kilometer.

"Ke depan dengan adanya UU desa yang tidak lagi memperbolehkan APBD melakukan penganggaran perbaikan jalan nonstatus, maka dana untuk perbaikan jalan kabupaten akan makin meningkat," katanya.

Kepala Bappeda Tabanan IB Wiratmaja mengatakan, untuk

infrastruktur, Pemkab Tabanan memiliki dua program yang terbukti mendapat apresiasi masyarakat luas yaitu program partisipatif dan program GIS. Program ini telah menysasar seluruh desa di Kabupaten Tabanan. Sejak diluncurkan tahun 2013, program ini telah menysasar 74 objek/lokasi dengan anggaran senilai Rp 10 miliar. Selanjutnya tahun 2014 jumlah sasaran meningkat menjadi 81 lokasi dengan anggaran Rp 13,3 miliar. Tahun 2015 kembali menysasar 80 lokasi dengan nilai anggaran 13,6 miliar. (bit)



WTP Jembrana Diganjar Penghargaan^v

NEGARA - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI Perwakilan Bali terhadap Pengelolaan Keuangan Jembrana Tahun 2014, menuai penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan untuk bupati Jembrana I Putu Artha atas keberhasilannya menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2014 dengan capaian opini audit WTP tersebut diserahkan Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuan-

gan Pemerintah Tahun 2015, Jumat (2/10) lalu di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta kepada Inspektur Impektorat Jembrana Ni Wayan Koriani.

Menurut Menkeu Bambang Brojonegoro, upaya untuk meningkatkan komitmen bagi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mensinergikan pengelolaan keuangan Negara harus terus ditingkatkan. Rakernas ini mengambil tema implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual era baru akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia.

Dengan tema itu, diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sementara itu Inspektur, Ni Wayan Koriani mengatakan, penerapan akuntansi berbasis akrual juga menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif, tidak hanya sekadar informasi kas, sehingga informasi tersebut dalam dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. (nom/yor)



PEMKAB JEMBRANA FOR RADAR BALI

WAKILI BUPATI: Inspektur Jembrana Ni Wayan Koriani saat menerima penghargaan dari Menkeu untuk Pemkab Jembrana.

Edisi : Senin, 5 Oktober 2015

Hal. : 29



WTP,

Badung Raih Penghargaan Kemenkeu

KOMITMEN dan keberhasilan Kabupaten Badung melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan senantiasa berpedoman kepada prinsip tata kelola keuangan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel atas LKPD 2014 berbuah manis. Selain meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, kini atas prestasi tersebut giliran pemerintah pusat memberikan apresiasi melalui Kementerian Keuangan. Yakni, dengan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung yang diterima penjabat sementara (Pjs) Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat lalu (2/10).

Acara tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat Negara. Hadir juga Asisten Administrasi Umum Pemkab Badung I Gusti Ngurah Oka Darmawan, Kepala Inspektorat Luh Suryaniti, Kabag Keuangan I Ketut Gede Suyasa, dan Sekretaris Bappeda dan Litbang Agus Aryawan. Pemerintah Pusat beri penghargaan pada 207 entitas pelaporan 26 pemerintah provinsi, 149 pemerintah ka-

bupaten, 50 pemerintah kota yang berhasil menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan opini audit WTP.

Penghargaan diserahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro diterima Pjs. Bupati Badung Harry Yudha Saka. Penghargaan serupa juga diterima 62 kementerian dan lembaga setingkat, 26 pemprov, dan 50 pemkot yang laporan keuangannya di tahun anggaran 2014 meraih WTP dari BPK. Menteri Bambang Brodjonegoro mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kementerian dan lembaga setingkat serta pemerintah

daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik. Khususnya yang mampu meraih opini WTP

dari BPK.

Pjs Bupati Badung Harry Yudha Saka mengungkapkan, penghargaan ini patut di-

syukuri dan merupakan hasil kerja keras seluruh SKPD Pemkab Badung dan menjadi sebuah kebanggaan bagi daerah dan Pemkab Badung yang merupakan penyumbang untuk tetap bekerja secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Dengan diperolehnya penghargaan WTP ini, wajib bagi Pemerintah Kabupaten Badung untuk mempertahankan dan ini tentu menjadi komitmen Pemkab Badung," tegas Harry Yudha Saka. (advertorial/san/djo)



MEMBANGGAKAN: Pjs Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka (kanan) menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta, Jumat (2/10).

Edisi : Senin, 5 Oktober 2015

Hal. : 24